



---

## **Manajemen Dakwah dalam Lembaga Politik: Studi Pustaka pada DPD PKS Kabupaten Tangerang**

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
<p>Hazar Aulia Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten <a href="mailto:Hazaraulia7@gmail.com">Hazaraulia7@gmail.com</a> +6285813120104</p> <p>Livia Tri Wijayanti Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten <a href="mailto:liviatriwijayanti@gmail.com">liviatriwijayanti@gmail.com</a> +6285730049872</p> <p>Refi Luthfiah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten <a href="mailto:Refiluthfiah04@gmail.com">Refiluthfiah04@gmail.com</a> +6287777591713</p> <p>Riva Khoirul Fadhilah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten <a href="mailto:rivakhoirulf@gmail.com">rivakhoirulf@gmail.com</a> +6287786483996</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Aulia, H., Wijayanti, L. T., Luthfiah, R., & Fadhilah, R. K. (2025). Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Kooperatif Tipe Scramble dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 762-767.

### Abstrak

Artikel ini mengkaji bagaimana manajemen dakwah dijalankan oleh lembaga politik, khususnya Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tangerang. Melalui pendekatan studi pustaka, artikel ini mengupas konsep-konsep manajemen dakwah dan implementasinya dalam lembaga politik berbasis Islam. PKS sebagai partai yang lahir dari semangat dakwah, memposisikan aktivitas politiknya sebagai bagian dari perjuangan ideologis dan pelayanan kepada masyarakat. DPD PKS Kabupaten Tangerang menjadi contoh konkret bagaimana manajemen dakwah dijalankan secara sistematis melalui perencanaan program, kaderisasi, pelaksanaan program dakwah berbasis komunitas, dan evaluasi berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan dakwah yang dilakukan bersifat kontekstual, memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat lokal, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian dakwah kontemporer serta mendorong pengembangan konsep dakwah politik yang etis, profesional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

**Kata kunci :** *Manajemen Dakwah, Lembaga Politik, PKS, Kabupaten Tangerang, Strategi Dakwah*

### Abstract

This article examines how da'wah management is carried out by political institutions, especially the Regional Executive Board (DPD) of the Prosperous Justice Party (PKS) of Tangerang Regency. Through a literature study approach, this article explores the concepts of da'wah management and its implementation in Islamic-based political institutions. PKS as a party born from the spirit of da'wah, positions its political activities as part of the ideological struggle and service to the community. DPD PKS Tangerang Regency is a concrete example of how da'wah management is carried out systematically through program planning, regeneration, implementation of community-based da'wah programs, and continuous evaluation. The results of the study show that the da'wah approach taken is contextual, pays attention to the social needs of local communities, and remains rooted in Islamic values. This article is expected to contribute to contemporary da'wah studies and encourage the development of the concept of political da'wah that is ethical, professional, and responsive to community dynamics.

**Key Words :** *Da'wah Management, Political Institution, PKS, Tangerang Regency, Da'wah Strategy*

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama sekaligus Negara. Islam dianggap sebagai satu-satunya agama yang memiliki ajaran yang paling utuh, serba lengkap, dan senantiasa sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, paradigma ini kerap menggiring umat Islam untuk menampilkan agamanya dalam bentuk formal, yakni dengan menampilkan wajah literatur bangunan politik Islam waktu silam, tanpa upaya modifikasi dan kontekstualisasi dengan kebutuhan realitas.

Agama Islam menganjurkan kepada manusia tentang keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, amanah dan musyawarah, yang kesemuanya itu dalam rangka mewujudkan suatu tata kehidupan masyarakat dan Negara yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup yang berkesinambungan, baik kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Dan "bahwa pada dasarnya universalisme ajaran (agama) Islam telah memuat prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan-hubungan sosial termasuk demokrasi".

Demokrasi merupakan kata yang senantiasa mengisi perbincangan lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas bawah sampai masyarakat kelas elit, sebut saja tokoh masyarakat, politisi, mahasiswa, cendekiawan, dan seterusnya. Lebih dari itu, demokrasi diyakini sebagai salah satu alternatif sistem nilai yang berkembang dalam sendi kehidupan manusia dan masyarakat, bahkan Negara.

Demokrasi merupakan salah satu aliran filsafat yakni suatu aliran yang meninjau asal usul kekuasaan politik suatu Negara yang didasarkan kepada keinginan umum rakyat. Dalam hal ini rakyat dapat digambarkan sebagai suatu aturan hukum yang melahirkan keinginan umum dan mengilhami isi paham demokrasi. Kekuasaan yang menganut sistem demokrasi dalam suatu Negara berada ditangan rakyat itu sendiri, pada hakikatnya demokrasi berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Pendapat lain menyebutkan bahwa, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas, prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnebebasan politik.

Dalam masyarakat yang besar, bisa memberikan pengaruh yang kecil sebagai individu, tetapi pengaruh itu bisa besan mereka bergabung dengan membentuk suatu perkumpulan. Partai politik menjalankan berbagai macam peran dan fungsi. Keberadaan partai-partai politik yang merupakan bagian dari suatu mekanisme penting dalam kehidupan demokrasi."

Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan, ketika masyarakat dianggap apatis atau masa bodoh, selalu bergantung kepada penguasa atau pemimpin mereka, atau karena alasan-alasan yang pada akhirnya, masyarakat hanya berperan sebagai obyek dalam kehidupan berpolitik dalam sistem penyelenggaraan Negara. Ketika demokrasi itu secara sederhana diartikan "dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat", maka keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijaksanaan publik menjadi prasyarat. Sebab, jika tidak ada partisipasi rakyat, tidak akan ada "dari dan oleh rakyat". Akan tetapi, rakyat tidak mungkin dapat terlibat dalam proses kebijaksanaan publik, ketika rakyat sangat apatis, masa bodoh. terpinggirkan, hanya sebagai pelengkap dalam sistem kenegaraan.

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan, kedudukan politik biasanya dilakukan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), bagi PKS kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi sesama insan dan semua golongan, guna mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bermartabat."

PKS sering disebut sebagai keajaiban politik di Indonesia. Betapa tidak, hanya sekitar satu tahun setelah dideklarasikan (Agustus 1998), partai yang semula bernama Partai Keadilan itu telah berhasil mengikuti pemilu 1999. Dalam pemilu 2004 sampai dengan 2009. PKS mampu meningkatkan jumlah suara yang sangat signifikan. Partai yang karena alasan electoral threshold berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik di Indonesia yang secara tegas membawa identitas Islam sebagai landasan perjuangan. Berbeda dari partai lain yang cenderung bersifat nasionalis-religius, PKS menempatkan dakwah sebagai inti dari aktivitas politiknya. Tidak hanya di tingkat pusat, semangat dakwah ini juga dijalankan secara sistematis oleh struktur PKS di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Tangerang.

DPD PKS Kabupaten Tangerang menjadi salah satu struktur penting dalam penyebaran visi dakwah partai. Dengan posisi geografis yang strategis dan masyarakat yang heterogen, DPD PKS dituntut untuk mampu menjalankan dakwah secara kontekstual dan terorganisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana manajemen dakwah dijalankan oleh DPD PKS dalam

konteks lokal, guna memahami bagaimana dakwah politik bisa menjadi bagian dari pembangunan masyarakat (NURMALINA-FSH n.d.)

## **B. Metodologi**

Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk memperoleh data primer yang bersifat mendalam mengenai strategi manajemen dakwah yang diterapkan oleh DPD PKS Kabupaten Tangerang. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada narasumber yang memiliki peran langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dakwah di lingkungan partai. Narasumber dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan aktif dalam manajemen dakwah di DPD PKS Kabupaten Tangerang. Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara fleksibel pandangan, pengalaman, dan strategi yang diterapkan oleh lembaga dalam mengelola dakwah di ranah politik.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perencanaan Strategis Dakwah di DPD PKS**

DPD PKS Kabupaten Tangerang menyusun rencana dakwah berdasarkan hasil musyawarah daerah dan pemetaan sosial masyarakat. Setiap periode kepengurusan, struktur DPD merancang program kerja tahunan dan lima tahunan yang menyoroti aspek spiritualitas, sosial-ekonomi, dan advokasi masyarakat.

Misalnya, dalam konteks Kabupaten Tangerang yang urban, PKS memprioritaskan dakwah komunitas melalui program pelatihan kewirausahaan syariah, rumah Qur'an, dan majelis taklim ibu-ibu. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dakwah dilakukan dengan pendekatan kebutuhan lokal (need-based).

### **2. Pengorganisasian Kader dan Struktur Dakwah**

Struktur dakwah DPD PKS terbagi ke dalam beberapa bidang, seperti Bidang Kaderisasi, Bidang Dakwah, Bidang Perempuan, dan Bidang Sosial. Setiap bidang memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas dakwah. Kader ditempatkan berdasarkan potensi dan pengalaman mereka, baik di sektor pendidikan, sosial, maupun advokasi hukum.

DPD juga membina struktur internal hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, yang disebut Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Ranting (DPRa). Sistem kaderisasi dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui program *halaqah*, mentoring, pelatihan kepemimpinan, serta *dauroh tarbawi*.

### **3. Pelaksanaan Program Dakwah Berbasis Komunitas**

Program-program dakwah yang dijalankan mencakup bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya, pembagian sembako kepada warga tidak mampu, penyelenggaraan sekolah ibu, hingga pengajian rutin yang terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan ini tidak bersifat eksklusif untuk kader PKS, tetapi inklusif bagi seluruh masyarakat.

PKS juga menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah digital. Melalui akun resmi DPD, mereka menyebarkan konten keislaman, informasi kegiatan sosial, serta edukasi politik yang bersih dan santun.

### **4. Evaluasi dan Monitoring Program Dakwah**

DPD PKS melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dakwah melalui rapat evaluasi bulanan dan tahunan. Setiap program harus dilaporkan secara tertulis, disertai analisis capaian dan kendala. Hasil evaluasi ini dijadikan dasar untuk penguatan program berikutnya, serta menjadi bahan refleksi organisasi agar tetap relevan dan dinamis dalam menjawab tantangan zaman.

Manajemen dakwah dalam organisasi politik di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dengan berkembangnya politik Islam di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kader DPD PKS Kabupaten Tangerang, dakwah dalam organisasi politik tidak lagi cukup mengandalkan pendekatan tradisional, melainkan harus adaptif terhadap dinamika sosial dan politik yang terus berubah. Narasumber menyatakan bahwa dakwah di ranah politik memiliki misi ganda, yaitu memperkuat nilai-nilai keislaman sekaligus menjadi sarana edukasi politik yang beretika bagi masyarakat.

"Dakwah di organisasi politik itu bukan semata-mata tentang syiar agama, tapi juga tentang mendidik masyarakat agar paham politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kita harus siap menghadapi dinamika politik modern yang semakin kritis, tanpa kehilangan esensi dakwah," (Wawancara, 13 April 2025).

Dalam hal strategi manajemen dakwah, narasumber menjelaskan bahwa organisasi politik seperti DPD PKS menerapkan strategi yang fleksibel, berbasis kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial-politik di daerah setempat. Perencanaan program dakwah dilakukan dengan memperhatikan aspirasi akar rumput dan mempertimbangkan isu-isu aktual yang relevan.

"Strateginya itu harus kontekstual. Dakwah di partai politik tidak bisa hanya sekadar menyampaikan ceramah, tapi harus dirancang dalam bentuk program-program sosial yang langsung menyentuh kebutuhan umat," (Wawancara, 13 April 2025).

Peran media sosial dan teknologi juga menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas dakwah di lingkungan politik. Narasumber menegaskan bahwa pemanfaatan platform digital seperti Instagram, YouTube, dan WhatsApp merupakan bagian dari strategi komunikasi dakwah yang modern dan lebih mudah diterima oleh generasi muda.

"Kalau sekarang tanpa media sosial, dakwah bisa tertinggal. Lewat konten-konten kreatif, pesan dakwah jadi lebih mudah diserap, terutama oleh kalangan muda yang lebih dekat dengan gadget," (Wawancara, 13 April 2025).

Terkait tantangan bahwa dakwah kerap dianggap sebagai alat politik, narasumber menegaskan bahwa hal tersebut merupakan persepsi yang tidak bisa dihindari, namun bisa dijawab melalui keteladanan dan konsistensi program dakwah yang murni untuk kemaslahatan umat.

"Memang stigma itu ada, dakwah dianggap alat politik. Tapi tugas kita adalah membuktikan lewat program nyata bahwa dakwah tetap berfokus pada pembinaan umat, bukan sekadar kepentingan politik," (Wawancara, 13 April 2025).

Dalam proses kaderisasi dakwah, DPD PKS Kabupaten Tangerang mengedepankan penguatan ideologi dan pemahaman nilai-nilai Islam yang integral, dengan menanamkan jiwa kepemimpinan, pengabdian, serta militansi dakwah sejak dini kepada para kader.

"Proses kaderisasi kami rancang tidak hanya untuk membentuk kader yang paham agama, tapi juga yang siap berjuang di ruang sosial dan politik. Dakwah butuh kader yang kuat secara spiritual, intelektual, dan sosial," (Wawancara, 13 April 2025).

Sebagai penutup, narasumber memberikan pesan khusus kepada mahasiswa yang ingin aktif dalam dakwah di dunia politik agar selalu menjaga niat, integritas, dan konsistensi dalam perjuangan dakwah di tengah realitas politik yang dinamis.

"Mahasiswa jangan takut terjun ke dunia politik, justru di sanalah medan dakwah yang luas. Yang penting niatnya lurus, ilmunya cukup, dan jangan mudah terpengaruh oleh pragmatisme politik," (Wawancara, 13 April 2025).

## D. Kesimpulan

Manajemen dakwah yang dijalankan oleh DPD PKS Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa aktivitas dakwah bisa berjalan sinergis dalam bingkai politik tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan sosial. Dengan pendekatan manajemen yang sistematis, dakwah politik tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan umat.

Melalui perencanaan strategis, kaderisasi yang kuat, pelaksanaan program berbasis kebutuhan masyarakat, dan evaluasi yang rutin, DPD PKS berhasil menjadi contoh bagaimana organisasi politik Islam bisa memainkan peran dakwah yang adaptif dan solutif. Kajian ini menunjukkan pentingnya integrasi antara nilai dakwah dan strategi manajerial dalam konteks organisasi politik.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan observasi langsung dan wawancara mendalam guna memperkuat data empiris dan memperkaya analisis.

## E. Referensi

- Abdullah, A. (2002). *Islam dan Ilmu Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azizi Qodri, A. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*. Jakarta: Lemhannas.
- Azra, A. (2003). *Islam Substantif*. Jakarta: Mizan.
- Betham, David dan Kevin Boyle. (2004). *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiarjo, M. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,.
- Jalil, M. A. (1994). "Pokok-Pokok Pikiran Tentang Agama dan Demokrasi." Dalam *Agama dan Demokrasi*, cet. ke-2, h. 122. Jakarta: P3M.
- Mahfud MD. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media.
- Nashir, H. (2014). *Politik Dakwah Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- PKS.or.id. "Visi Misi dan Struktur Organisasi PKS." 2023. Diakses dari [<https://pks.id>].
- Rahmat, M. I. (2008). *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus Ke Gudang Parlemen*. Yogyakarta: LKiS.
- Rangkuti, F. (2006). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sahasrad, H. (2008). *PKS dan Kepemimpinan Islam Masa Depan*. Jakarta: Psik Paramadina.
- Sudaryanto, A. (2011). *Manajemen Dakwah*. Yogyakarta: Graha Ilmu,.
- Ubaidillah. (2000) *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Wahid, A. (2020). "Dakwah dan Politik: Studi atas Strategi PKS di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Islam* 10(1): 55–70.
- Zada, K., dan Arafah, A. (2004). *Diskursus Politik Islam*. Jakarta: LSIP, cet. ke-1.